

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Heroe Agoesdijanto¹, Sri Endang Suciaty²

Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Kota Malang

Email: heroeagoesdijanto@gmail.com, endang.suciaty.31@gmail.com

Abstrak: IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di Kota Malang, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Analisanya dilakukan oleh Bappeda Kota Malang sebagai acuan evaluasi keberhasilan pembangunan, dan penyusunan program lanjutan, agar IPM meningkat, dan pembangunan terdistribusi merata. Hal inilah yang menjadi latar belakang Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. IPM dihitung sebagai rata-rata dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut : $IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Daya Beli})$. Hasil analisis kajian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang pada tahun 2014 adalah sebesar 79,07. Besaran indeks ini termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,29 poin. Dengan nilai reduksi shortfall 1,04 termasuk cepat hal ini terjadi di karenakan tingkat besaran IPM Kota Malang sejak tahun 2007 mempunyai cenderung cepat. Ditingkat provinsi angka IPM Kota Malang menduduki urutan ke - 3 (tiga) setelah Kota Surabaya, sehingga mengalami penurunan yang pada tahun 2013 peringkat ke-2 (dua). Secara komposit/parsial di kabupaten/kota di Jawa Timur Indeks Kesehatan pada peringkat 16 (enam belas), Indeks Pendidikan Kota Malang menduduki peringkat ke - 1 (satu) dan Indeks Ekonomi pada peringkat ke-3 (tiga). Apabila dibandingkan dengan kondisi di wilayah Malang Raya untuk IPM Kota Malang masih menduduki posisi pertama, baik di lihat secara angka IPM maupun dilihat dari komposit IPM.

Kata kunci: Indeks, Pembangunan, Manusia

Abstract: IPM explains how humans have the opportunity to access the outcome of a development process, as part of their right to income, health, education and so on. In Malang, the Human Development Index (HDI) is released by the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis was carried out by Bappeda Kota Malang as the reference for the evaluation of the success of development, and the preparation of the follow-up program, in order that the HDI will increase, and the development will be evenly distributed. This is the background of Preparation of Human Development Index Analysis (IPM) Malang for the Budget Year 2015. HDI is calculated as an average of 3 (three) indexes that describe the basic human capabilities in expanding choice options, namely Life Expectancy Index, Education Index and Decent Living Standard Index. The general formula used is as follows: $IPM = \frac{1}{3} (\text{Health Index} + \text{Education Index} + \text{Power Buy Index})$. The result of analysis of this study is Human Development Index of Malang in the year 2014 is equal to 79,07. The index size is included in the middle to upper classification. Increase from 2013 by 0.29 points. With the value of shortfall 1.04 including rapid reduction this happens in because the level of HDI HDI since 2007 has tended to fast. At the provincial level, the HDI of Malang is ranked 3rd (3rd) after Surabaya, so that the decrease in the year of 2013 is ranked 2nd (two). Composite / partial in districts / cities in East Java Health Index at rank 16 (sixteen), Education Index of Malang was ranked 1 (one) and Economic Index at rank 3 (three). When compared with the conditions in the area of Malang Raya for HDI Malang still occupy the first position, both seen in the number of HDI and viewed from the composite IPM.

Keywords: Index, Development, Human

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan dalam suatu wilayah adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan yang mendasar meliputi struktur-struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan

kemiskinan. Pembangunan juga merupakan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan kerjasama, kebutuhan dasar, dan keinginan mayoritas individu maupun kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi yang lebih baik.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen spesifik atas "kehidupan yang lebih baik" itu, pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu.

Untuk melaksanakan pembangunan yang secara adil dan merata, isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan nasional adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan semakin bertambahnya penduduk miskin. Adanya kemiskinan di dalam suatu wilayah merupakan potret bahwa pembangunan itu secara umum kurang berhasil sehingga pada dasarnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Secara sederhana, pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya Pembangunan bersifat multi dimensional dan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan, konsep dan pemikiran mengenai Pembangunan telah mengalami perkembangan yang pesat.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan seringkali dijumpai pemahaman yang meng-asosiasikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Model pemikiran ini telah mengantarkan sejumlah negara sedang berkembang memasuki tahapan modernisasi dan industrialisasi sebagai titik lompatan menuju kehidupan yang maju dan sejahtera. Namun paradigma pembangunan tersebut banyak menuai kritik karena hasil dari pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang bersifat materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan menegaskan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagaisintesa telah mengemuka pemikiran baru tentang pembangunan, yang memusatkan pada 3 isu fundamental, yaitu :

distribusi pendapatan,

- 1) ketidakadilan,
- 2) kemiskinan, dan
- 3) kebebasan dan demokrasi.

Menurut paradigma ini makna hakiki dari pembangunan bukanlah semata-mata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan dan penghapusan ketidakadilan. Selanjutnya paradigma ini menawarkan pula suatu rumusan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom), dimana pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis, dengan menghilangkan kemiskinan dan berbagai penderitaan seperti kekurangan pangan, malnutrisi, pengidapan penyakit, buta

huruf, ketiadaan kebebasan sipil dan hak berdemokrasi, diskriminasi, serta berbagai bentuk perampasan hak-hak milik pribadi.

Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan telah menempatkan kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Lembaga PBB yang dibentuk untuk menangani masalah pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) telah membuat definisi khusus mengenai pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people's choices). Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Premis penting yang dikembangkan dalam pembangunan manusia adalah mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai alat atau instrument) dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara keseluruhan (tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan atas aspek ekonomi semata).

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga nilai :

- 1) Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- 2) Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- 3) Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro, pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa "pertumbuhan ekonomi"

(*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986: 30). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier.

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

1) Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2) Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3) Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan

nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4) Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5) Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of Life Index (PQLI)* digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung bersosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6) Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia

yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Di Kota Malang, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Analisanya dilakukan oleh Bappeda Kota Malang sebagai acuan evaluasi keberhasilan pembangunan, dan penyusunan program lanjutan, agar IPM meningkat, dan pembangunan terdistribusi merata. Hal inilah yang menjadi latar belakang Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

METODE

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah dengan menggunakan metode lama dan metode baru. Pada metode lama IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dihitung sebagai rata-rata dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut : $IPM = 1/3$ (Indeks Kesehatan + Indeks Pendidikan + Indeks Daya Beli).

Sedangkan untuk perhitungan dengan menggunakan metode baru ada perubahan yang menyangkut perhitungan indeks pendidikan dan indeks daya beli, sedangkan untuk indeks harapan hidup tidak ada perubahan.

Untuk agregasi perhitungan dengan metode baru adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS*
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf	1. Angka Melek Huruf	1. <i>Expected Years of Schooling</i>	1. <i>Expected Years of Schooling</i>
	2. Kombinasi APK	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i>
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{daya\ beli})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}$	

HASIL DAN PEMBAHASAN

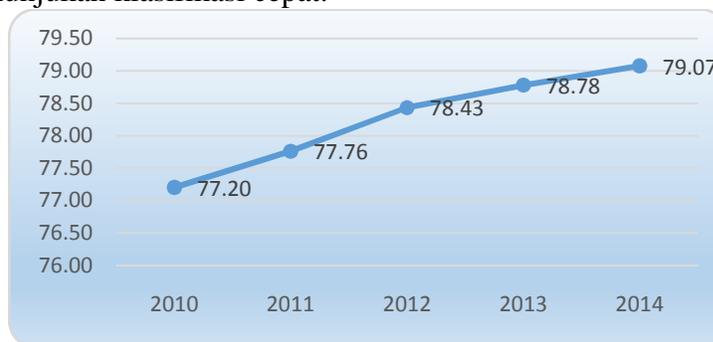
1. IPM Kota Malang Terhadap IPM Provinsi Jawa Timur

Nilai IPM Kota Malang menduduki peringkat ke-3 (tiga) antar kabupaten/kota di Jawa Timur setelah Kota Surabaya pada peringkat pertama dan Kota Mojokerto di

peringkat kedua. Sehingga untuk posisi peringkat mengalami penurunan yang pada tahun 2013 peringkat 2 (dua).

Sedangkan secara komposit Indeks Kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup berada pada peringkat 16 (enam belas) apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Untuk Indeks Pendidikan yang dihitung dari Rata-rata Lama Sekolah dan Melek Huruf Kota Malang masih tetap menduduki peringkat pertama di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dan Untuk Indeks Ekonomi yang dihitung dari Kemampuan daya Beli menduduki peringkat ke 3 (tiga) di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Secara umum IPM Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2002 walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan nilai indikator Angka Harapan Hidup yang namun secara keseluruhan IPM tetap mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari nilai *reduksishortfall* sebesar 1,40 menunjukkan kecenderungan yang positif mengingat percepatan menunjukkan klasifikasi cepat.



Gambar 1. Nilai IPM di Kota Malang Tahun 2010- 2014

Peningkatan nilai IPM Kota Malang ini tidak lain karena adanya peningkatan pada sisi-sisi komposit pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, serta Kemampuan Daya Beli di masyarakat.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa masing-masing komponen tersebut pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup bagus. walaupun ada beberapa komponen yang mengalami penurunan. Namun secara simultan Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang mengalami kenaikan yang signifikan.

Untuk komponen-komponen yang telah mengalami kenaikan ada baiknya tetap di pertahankan melalui peningkatan-peningkatan serta menambah intensitas program-program yang telah dilaksanakan. Sedangkan beberapa komponen yang mengalami penurunan perlu pembenahan terhadap program-program dan strategi yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki hasil dari nilai perhitungan IPM.

Apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Timur pada tahun 2014 IPM Kota Malang masih berada pada posisi diatas nilai Indeks Jawa Timur.

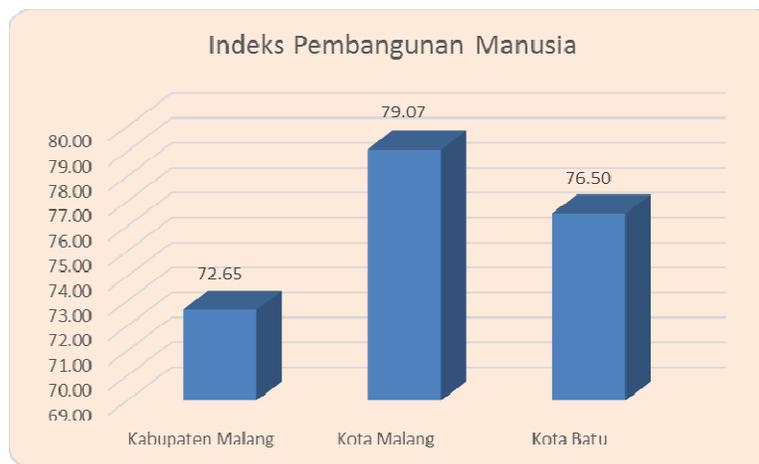


Gambar 2. Perbandingan Nilai IPM Kota Malang dan Jawa Timur Tahun 2014

2. IPM Kota Malang Terhadap IPM Wilayah Malang Raya

Pembangunan manusia di Kota Malang sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan wilayah sekitar khususnya untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu. Apabila dilihat dari peringkat IPM di Jawa Timur. IPM Kota Malang menduduki peringkat ke 1 sedangkan untuk Kabupaten Malang menduduki peringkat ke-3 dan untuk Kota Batu menduduki peringkat ke-2.

Apabila dilihat dari nilai komposit pembentuknya, untuk Indeks Pendidikan Kota Malang menempati peringkat ke-1, sedangkan untuk Kabupaten Malang menempati peringkat ke-3 dan untuk Kota Batu menempati peringkat ke-2. Sedangkan untuk Indeks Pendidikan Kota Malang menempati peringkat ke-1, Kabupaten Malang menempati peringkat ke-3 dan Kota Batu menempati peringkat ke-2. Indeks Daya Beli di Kota Malang menempati peringkat ke-1, sedangkan untuk Kabupaten Malang menempati peringkat ke-3 dan Kota Batu menempati peringkat ke-2. Untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik di bawah ini.



Gambar 3. Nilai IPM di Kota Malang Tahun 2010- 2014

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab V maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang pada tahun 2014 adalah sebesar 79,07. Besaran indeks ini termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,29 poin.
2. Dengan nilai reduksi shortfall 1,04 termasuk cepat hal ini terjadi di karenakan tingkat besaran IPM Kota Malang sejak tahun 2007 mempunyai cenderung cepat.
3. Ditingkat propinsi angka IPM Kota Malang menduduki urutan ke – 3 (tiga) setelah Kota Surabaya, sehingga mengalami penurunan yang pada tahun 2013 peringkat ke-2 (dua).
4. Secara komposit/parsial di kabupaten/kota di Jawa Timur Indeks Kesehatan pada peringkat 16 (enam belas), Indeks Pendidikan Kota Malang menduduki peringkat ke – 1 (satu) dan Indeks Ekonomi pada peringkat ke-3 (tiga).
5. Apabila dibandingkan dengan kondisi di wilayah Malang Raya untuk IPM Kota Malang masih menduduki posisi pertama, baik di lihat secara angka IPM maupun dilihat dari komposit IPM.

SARAN

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diberikan saran sebagai startegi peningkatan IPM di Kota Malang yang meliputi :

1. Strategi Peningkatan Indeks Kesehatan

Sehubungan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu :

- a. Pemaksimalan program-program pemerintah bagi masyarakat kurang mampu misalnya Jampersal serta pengobatan gratis. Karena hal ini sangat membantu sekali dalam peningkatan kesehatan di masyarakat.
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada tenaga medis khususnya yang menangani kelahiran (dokter, bidan dan perawat) sehingga akan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penatalaksanaan kelahiran.

2. Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan

- a. Pemaksimalan menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
- b. Meningkatkan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional.
- c. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah jalur formal dan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2014, *Indek Pembangunan Manusia Kota Malang*, Bappeda Kota Malang.
- _____, 2004, *“The Economics of Demografi Financial Human Development in Indonesia”*, Nation Human Development Report.
- _____, 2015, *“Profil Kesehatan Kota Malang 2014”*, Dinas Kesehatan Kota Malang.
- _____, 2015, *“LAKIP 2014”*, Dinas Kesehatan Kota Malang.
- _____, 2015, *“Profil Pendidikan Kota Malang 2014”*, Dinas Pendidikan Kota Malang.
- _____, 2015, *“LAKIP 2014”*, Dinas Pendidikan Kota Malang.
- _____, *Sarana Olahraga*, www.malangkota.go.id.
- ADB, 1992, *“Benefit Monitoring and Evaluation”*, A Handbook For Bank Staff Of Executing Agencies an Consultants.
- Akita, T dan A. Alisjahbana, 2002, *“Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis”*, Bulletin of Indonesian Economic Studies 38 (2): 201-222.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *“Ekonomi Pembangunan”*, Edisi ke-4, Cetakan ke-1, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Bardhan, P, 1996 *“Efficiency, Equity and Poverty Alleviation” : Policy Issues In Less Developed Countries*, Journal IMF Staff Papers Washington.
- Bayo A, Anre (Ed), 1993, *“Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan”*, Liberty, Yogyakarta. Garcia, J.G. dan L. Soelistianingsih, 1998, *“Why Do Differences in Provincial Income Persist in Indonesia?”*, Bulletin of Indonesian Economic Studies 34 (1): 95-120.
- Ginancar K, 1995, *“Pemberdayaan Masyarakat”*, Jurnal Studi Pembangunan Pascasarjana, ITB Bandung.
- Harbison, Frederick H., 1973, *“Human Resources as the Wealth of Nations”*, Oxford University, New York.
- Hers, J. 1998, *“Human Capital and Economic Growth: A Survey of the Literature”*, CPB Report 1998/2.
- Mubyarto, 1993, *“Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan”*, UGM Yogyakarta
- Moelyarto, 1993, *“Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan”*, Makalah UGM, Yogyakarta
- Nugroho H, 1999, *“Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan”*, LP Aditya Media, Yogyakarta.